



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1 RW 2, Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1046 /DJU/PW1.1.1/VI/2025 Jakarta, 05 Juni 2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Pelaksanaan Uji Publik pada Satuan Kerja
yang diusulkan memperoleh predikat WBK

- Yth. 1. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding
Calon Unit Kerja Berpredikat WBK Tahun 2025 (Daftar terlampir)
2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama
Calon Unit Kerja Berpredikat WBK Tahun 2025 (Daftar terlampir)

Menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor: 1943/BP/PW1.1.1/VI/2025 tanggal 5 Juni 2025 perihal Pelaksanaan Uji Publik pada Satuan Kerja yang diusulkan memperoleh predikat WBK Tahun 2025, sehubungan dengan hal tersebut disampaikan bahwa tahapan evaluasi mandiri terhadap Program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025 telah dimulai. Sehingga pelaksanaan Uji Publik sebagai bagian dari proses evaluasi untuk meningkatkan kualitas penilaian terhadap keterlibatan publik dalam pengawasan peradilan, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Uji Publik ini hanya ditujukan bagi satuan kerja yang diusulkan memperoleh predikat WBK dalam rangka evaluasi mandiri Tahun 2025 (daftar terlampir), Uji Publik tersebut dilaksanakan melalui survei terbuka kepada satuan kerja yang diusulkan memperoleh predikat WBK, guna menghimpun persepsi dan informasi dari para pemangku kepentingan;
2. Seluruh satuan kerja yang diusulkan memperoleh predikat WBK (daftar terlampir), wajib mempublikasikan tautan Uji Publik sejak tanggal 5 Juni s.d. 30 September 2025 melalui laman resmi pengadilan, media sosial resmi (jika tersedia), papan pengumuman, serta kanal sosialisasi lainnya dengan narasi sebagai berikut:

"Dukung kami dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Bapak/Ibu dapat berpartisipasi dengan mengisi kuesioner melalui tautan berikut:

<https://bawasmari.mahkamahagung.go.id/survey/>



Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Kamar Umum Mahkamah Agung RI;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.



Lampiran I
Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 1046 /DJU/PW1.1.1/VI/2025
Tanggal: 5 Juni 2025

Daftar terlampir :

No	Satuan Kerja
1	Ketua/Kepala Pengadilan Tinggi Banda Aceh
2	Ketua/Kepala Pengadilan Tinggi Bengkulu
3	Ketua/Kepala Pengadilan Tinggi Makassar
4	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Barat
5	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Balikpapan
6	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Serang
7	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Bangil
8	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Cilacap
9	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Banjarmasin
10	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Sumbawa Besar
11	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Bengkulu
12	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Pelalawan
13	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Purbalingga
14	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Batang
15	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Purwokerto
16	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Rokanhilir
17	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Kudus
18	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Bulukumba
19	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Blora
20	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Tabanan
21	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Sekayu
22	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Karawang
23	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Sukabumi
24	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Cianjur
25	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Purwakarta
26	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Lhoksukon
27	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Pekalongan
28	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Banjarbaru
29	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Simalungun
30	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Bojonegoro
31	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Boyolali
32	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Nganjuk
33	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Unaaha
34	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Lubukbasung
35	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Namlea
36	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Nunukan
37	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Tanjung Pandan
38	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Tembilahan
39	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun



40	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Rembang
41	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Semarang
42	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Ngabang
43	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Sinabang
44	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
45	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Bangli
46	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
47	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Marabahan
48	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Kualakurun
49	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Jantho
50	Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan

